

## KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 disusun sebagai rangkuman seluruh pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya. Hal ini merupakan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan ini menyediakan hasil kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2021, yang didalamnya menggambarkan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan dan pencapaian program dan kegiatan. Laporan ini dapat diselesaikan berkat kerjasama yang baik antar seluruh bidang dilingkungan DinsosP3APKB Kabupaten Dharmasraya.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan mampu memberikan jawaban serta tantangan atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja. Namun tetap disadari, bahwa laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritikan yang sipatnya membangun dari berbagai pihak sangat diperlukan dan diharapkan.

Pulau Punjung, 10 Januari 2022

KEPALA DINAS,



**BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19820521 200012 1 002

## KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 disusun sebagai rangkuman seluruh pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya. Hal ini merupakan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan ini menyediakan hasil kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2021, yang didalamnya menggambarkan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan dan pencapaian program dan kegiatan. Laporan ini dapat diselesaikan berkat kerjasama yang baik antar seluruh bidang dilingkungan DinsosP3APKB Kabupaten Dharmasraya.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan mampu memberikan jawaban serta tantangan atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja. Namun tetap disadari, bahwa laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritikan yang sipatnya membangun dari berbagai pihak sangat diperlukan dan diharapkan.

Pulau Punjung, Januari 2022

KEPALA DINAS,

**BOBBY F. RIZA, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19820521 200012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
BAB II KEBIJAKAN UMUM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	3
A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	3
B. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	54
BAB III PENUTUP	55

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. PENDAHULUAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

Adapun ruang lingkup LKPJ adalah mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. LKPJ itu sendiri terdiri atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan. LKPJ Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya merupakan LKPJ Akhir Tahun Anggaran, yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bagian dari OPD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dimaksudkan sebagai salah satu bahan penyusunan LKPJ Bupati pada akhir Tahun Anggaran 2020, untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya. LKPJ Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertujuan agar dapat memberikan gambaran menyeluruh secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pelaksanaan pembangunan sub sektor Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Dharmasraya, baik yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat maupun APBN Tahun 2021.

**B. DASAR HUKUM**

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Undang undang No 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. PENDAHULUAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

Adapun ruang lingkup LKPJ adalah mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. LKPJ itu sendiri terdiri atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan. LKPJ Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya merupakan LKPJ Akhir Tahun Anggaran, yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bagian dari OPD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dimaksudkan sebagai salah satu bahan penyusunan LKPJ Bupati pada akhir Tahun Anggaran 2020, untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya. LKPJ Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertujuan agar dapat memberikan gambaran menyeluruh secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pelaksanaan pembangunan sub sektor Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Dharmasraya, baik yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat maupun APBN Tahun 2021.

**B. DASAR HUKUM**

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Undang undang No 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kab Solok Selatan Dan Kab Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat.

2. Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang- Undang No 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, Urai Tugas Jabatan, Serta Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan kerja (renja) menurut Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan disusun sesuai dengan tupoksi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang setiap tahunnya berpedoman dalam Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipertanggungjawabkan melalui Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Maksud penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagai pertanggungjawaban Program dan Kegiatan Tahun 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3APPKB).

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

Kabupaten Dharmasraya

## BAB II

### KEBIJAKAN UMUM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN

#### A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

##### I. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sosial	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Peerindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		I Program Pemberdayaan Sosial					
				1 Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					
				- Peningkatan Kemampuan	Kegiatan ini dilaksanakan	Jumlah dana yang dialokasikan untuk	Dalam pelaksanaan kegiatan ini	a. Solusi sudah yang	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kot a	berupa pemberian pengganti transportasi bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di (TKSK) tingkat Kecamatan tahun 2021 diberikan penggantian sebanyak 26 kali perjalanan dengan nominal Rp. 100.000,- /org/kali kegiatan dengan total Rp 28.600.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah). Dengan penggantian transportasi	kegiatan ini sebesar Rp. 60.168.400,- (Enam puluh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebanyak Rp. 60.131.250,- (enam puluh juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau 99,9%.	citemukan kendala dengan keterbatasan anggaran mengakibatkan pengganti transportasi untuk PSM tidak bisa dibayarkan dan TKSK dibayarkan sebanyak 26 kali kegiatan dari 30 kali kegiatan, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.	dilaksanakan adalah memberikan pembinaan secara berkala serta memberikan motivasi terhadap PSM dan TKSK sehingga Tenaga Relawan dilapangan bisa bekerja secara maksimal b. Peningkatan kapasitas TKSK dan PSM dan pilar pilar sosial lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing dalam peningkatan kesejahteraan sosial bagi PPKS	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					diharapkan dapat membantu petugas sosial dilapangan untuk melaksanakan tugas sosialnya dalam penanggulangan permasalahan Kesejahteraan Sosial pada Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada, serta dalam membina Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) diwilayah kerjanya masing-masing. Disamping kegiatan diatas				

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Parmasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					<p>juga dilaksanakan pembinaan terhadap pendamping dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk Kabupaten Dharmasraya yaitu Suku Anak Dalam (SAD) yang berjumlah 19 KK, 77 jiwa dan 2 rombongan di 2 titik lokasi yaitu nagari Banai kecamatan Sembilan Koto dan Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar. Dari hasil pembinaan tersebut pada tahun ini sudah</p>				

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					<p>diberikan status kependudukan untuk SAD sebagai warga Kabupaten Dharmasraya yang sah, yang diterbitkan Kartu Keluarga (KK) dan Tanda Penduduk (KTP) serta kartu Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk tahun ini Suku Anak Dalam yang berada di Sembilan Koto, sudah menerima Bantuan sosial BPNT sembako Kegiatan lain yang</p>				

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					dilaksanakan adalah peningkatan kapasitas SDM untuk persiapan pelaksanaan program Puskesmas tahun 2022 yang rencana akan dipusatkan di Dinas Sosial/F3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Nagari Sungai Duo kecamatan Sitiung, Nagari Baru Kecamatan Koto Baru				
		- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga			Kegiatan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten	Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.663.800,- (Tiga puluh juta enam ratus enam puluh tiga	Permasalahan yang ditemukan kegiatan kelembagaan adalah kurangnya kesadaran	a. Solusi yang sudah dilaksanakan adalah dengan memberikan pembinaan	

# LKPP DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Dharmasraya dipimpin oleh ibu Dewi Sutan Riska yang mana kegiatannya bertujuan untuk kesejahteraan sosial bagi masyarakat Dharmasraya terutama masyarakat kurang mampu dan memberikan dukungan pemberdayaan kepada keluarga tertinggal diseluruh nagari dan jorong di Kabupaten Dharmasraya. Bentuk kegiatan yang sudah terlaksana	ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 30.490.550,- (Tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ratus lima puluh rupiah) atau 99,4 %.	masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan, itu masyarakat juga masih belum mau untuk melaporkan kasus-kasus yang belum terdamping	secara intensif kepada masyarakat dan pendekatan kepada pemuka-pemuka nagari serta memberikan sosialisasi kepada semua pihak tentang keberadaan LK3 dan LKKS.  b. Peningkatan kapasitas Tenaga Sosial dilapangan untuk pelaksanaan dan kegiatan program pendampingan kasus dilapangan	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					<p>adalah pembinaan terhadap posdaya yang sudah terbentuk dan mengaktifkan posdaya yang sudah terbentuk tapi tidak aktif, disamping itu juga ada kegiatan fasilitasi pembagian hewan qurban kepada seluruh nagari untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Kegiatan ini bekerjasama dengan Pemda kabupaten Dharmasraya.</p>				

# LKPP DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					Pada tahun 2021 ada 25 ekor sapi qurban dan 3 ekor kambing yang dibagikan kepada masyarakat. LKKS Kabupaten Dharmasraya juga mendapat binaan dari LKKS Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan pelatihan dan workshop baik yang dilakukan di kabupaten maupun di provinsi secara luring maupun daring. Selain LKKS, juga ada kegiatan kegiatan Lembaga					

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					<p>Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mana kegiatan ini merupakan pendampingan terhadap keluarga yang bermasalah seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan korban kekerasan. Pendampingan dimulai dari keluarga sampai ke badan hukum dan persidangan,</p>				

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Fermasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					dilengkapi dengan bantuan/dampingan psikologi. Tahun 2021 ada 16 kasus yang didampingi.				
				II					
				1	Program Perlindungan Jaminan Sosial				
					Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
					- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
						Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Dharmasraya.	Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 93.417.800,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebanyak Rp. 93.379.300,- (sembilan puluh tiga	a. Masih banyaknya petugas yang paham dengan tugas yang akan mereka kerjakan sebagai petugas verifikasi yang berganti-ganti; Belum	a. Untuk mengatasi permasalahan diatas sudah diintensifikan komunikasi di Group WhatsApp agar petugas verifikasi, operator dengan pihak Kabupaten selaku fasilitator

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					<p>Tahun 2021 sebanyak 132.519 jiwa dari 41.741 KK. Kegiatan verivali ini sangat penting karena Kab/Kota diberikan kesempatan melakukan perbaikan data empat kali dalam setahun pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Verifikasi dan validasi dilaksanakan pada empat kali setahun oleh Kepala Jorong selaku petugas pendata dan Operator</p>	<p>juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) atau 99,9%.</p> <p>c. Masih ada ditemukan saldo kosong setiap bulannya</p> <p>d. Masih belum lengkapnya mesin EDC yang disediakan di E-Warong oleh pihak Himbara (Bank Mandiri) karena ada mesin EDC yang rusak dan belum diganti</p>	<p>bisa saling berbagi informasi dan berdiskusi permasalahan yang ditemukan di lapangan dan permasalahan teknis.</p> <p>b. Untuk mengatasi di e-warong telah dilakukan koordinasi dengan pihak Himbara terkait saldo kosong dan mesin EDC yang belum tersedia di beberapa e-Warong. Saldo kosong disebabkan karena kartu hilang dan perubahan nomor rekening beberapa orang KPM. Untuk mesin EDC yang</p>		

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					<p>aplikasi SIKS-NG di Nagari. Finalisasi terakhir dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Kepala Jorong dan dapat mengusulkan data baru jika ditemukan masyarakat miskin yang belum ada dalam data DTKS tersebut.</p> <p>Disamping kegiatan diatas, kegiatan lain yang dilaksanakan adalah pengelalaan data, monitoring dan evaluasi kegiatan Program</p>			<p>belum tersedia, tetap dipinjamkan disaat pencairan sembako setiap bulannya.</p>	

# LKPP DINOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Sembako. Program Sembako merupakan program perubahan dari Bantuan Pangan Non Tunai menjadi Program Sembako. Program Sembako ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam hal makanan. Penyaluran dana program Sembako dilakukan melalui				

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					mekanisme uang elektronik dengan alat pembayaran berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana bantuan tersebut digunakan hanya untuk membeli komoditas bahan pangan yang telah ditentukan untuk program Sembako di Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warung) dan tidak dapat diambil tunai. Bila komoditas yang dapat				

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					<p>dibelanjakan sebelumnya beras dan atau telur, pada Program Sembako ditambahkan dengan komoditas bahan pangan yang mengandung karbohidrat (jagung, singkong, ubi, sagu serta umbi-umbian lainnya), protein hewani (daging ayam, daging, ikan), protein nabati (tahu, tempe dan kacang-kacangan) dan vitamin mineral (sayuran dan buah-buahan).</p>				

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					E-Warong yang telah ditunjuk di Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 57 e-Warong yang tersebar di 52 Nagari. Setiap bulannya KPM akan mengambil bahan pangan sesuai dengan ketentuan di E-warong dengan syarat membawa kartu KKS, Kartu sudah divaksin dan KTP. Jumlah KPM di Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2021 mengalami perubahan dari				

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					<p>KPM reguler sebanyak 8636, ditambah dengan data perluasan program sembako sebanyak 14.501 KPM sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 yang menggoyangkan ekonomi masyarakat diseluruh Indonesia. Data penerima ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal</p>				

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					<p>Penanganan Fakir Miskin.</p> <p>Selain program diatas juga dilakukan pengelolaan data penerima manfaat jaminan kesehatan (JKN) baik KPM bersumber dana APBD maupun APBN, jumlah PBI APBD tahun 2021 sebanyak 24.171 jiwa dan APBN sebanyak 55.026 jiwa</p>					
				2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Khusus PKH)	Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga yang telah ditetapkan	Realisasi fisik 100 %, sedangkan realisasi keuangan dengan dana tersedia Rp.21.177.500,- realisasi 100 % Resapan dana	a. Banyak warga masyarakat yang masih mengeluh untuk bisa dimasukkan sebagai penerima program PKH.	a. Semua Kementeraian/Le mbaga memakai DTKS dan kita sudah mengusulkan untuk	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					oleh Kementerian Sosial RI melalui seleksi dan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.	dipergunakan untuk Jasa Pengganti Transportasi Pendamping PKH. Sedangkan jumlah anggaran dari Kemensos RI untuk program PKH dari Anggaran sebesar Rp.14.108.250.000,- terealisasi sebesar Rp.13.985.125.000 dengan total 5.208 KPM dengan realisasi 99,13%. Alasan terhadap tidaknya realisasi 100% adalah KPM menabung, pergantian pengurus, gagal buka rekening kolektif, pindah alamat.	b. Masih banyaknya warga yang sebenarnya berhak masuk Program Keluarga Harapan namun penentuan quota ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemda tidak berhak untuk menambah tapi berhak untuk mengurangi.	penambahan penerima program PKH. b. Sudah berupaya untuk sosialisasi dan mengedukasi petugas operator nagari tentang perubahan data DTKS.	
				III	Program Rehabilitasi Sosial				
				1	Rehabilitasi Sosial Dasar				

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti, dengan sub kegiatan :					
				- Penyediaan Permakanan	Penyediaan permakanan merupakan standar pelayanan dasar bidang sosial yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang berada diluar	Dana tersedia sebesar Rp.35.700.000,- terealisasi Rp. 35.700.000,- serapan dana 100 %. Keberhasilan kegiatan 100 %. Kegiatan ini berupa pemberian paket permakanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berjumlah 35 orang : lansia terlantar 21 (dua puluh satu) orang, anak terlantar 2 (dua	a. Keterbatasan dana hanya bisa memberikan paket permakanan sebanyak 5 kali dan terbatas kepada PPKS yang benar-benar memerlukan. b. Regulasi yang ditetapkan pusat tidak bisa dijalankan dilapangan, karena ada keadaan yang sifatnya penting/emergensi yang perlu penanganan	a. Memberikan bantuan kepada PPKS sesuai skala prioritas. b. Mengajukan proposal kepada pusat untuk memfasilitasi pemberian paket permakanan yang tidak bisa diakomodir melalui dana APBD.	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					<p>panti yakni berupa paket permakanaan yang sesuai standar gizi. Adapun Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berjumlah 29 orang : lansia terlantar 21 (dua puluh satu), anak terlantar 2 (dua), penyandang disabilitas terlantar 2 (dua) dan tuna sosial 4 (empat) masing-masing mendapatkan paket permakanaan selama 5 (lima) kali dengan</p>	<p>orang, penyandang disabilitas terlantar dan penyandang disabilitas kurang mampu sebanyak 7 (tujuh) orang dan tuna sosial 4 (empat) orang sesuai dengan tuntutan Standar Pelayanan Minimal pelayanan dasar Bidang Sosial.</p>	secepatnya		

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					paket isi : Beras, Kacang Hijau, Gula, Biskuit, Susu.				
				- Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan alat bantu kepada PPKS yakni Penyandang Disabilitas Kurang Mampu dan Lansia Kurang Mampu karena keterbatasan dalam melakukan aktivitas maka memerlukan alat bantu untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan kemampuannya.	Dana tersedia sebesar Rp.15.200.000,- terealisasi Rp. 15.200.000,- serapan dana 100 %. Keberhasilan kegiatan 100 %. Kegiatan ini berupa pemberian alat bantu kepada 15 (lima belas) orang PPKS yang mempunyai keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari yakni lansia kurang mampu dan penyandang disabilitas kurang mampu.	a) Keterbatasan dana hanya bisa memberikan alat bantu kepada PPKS yang benar-benar memerikan. b) Pemberian bantuan alat bantu melalui dana pokir DPR RI masih belum tepat sasaran/asal mendata dan tidak adanya laporan ke Dinas Sosial.	a) Memberikan bantuan kepada PPKS sesuai skala prioritas. b) Mengajukan proprosal kepada pusat untuk memfasilitasi pemberian paket alat bantu yang tidak bisa diakomodir melalui dana APBD.	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Adapun alat bantu tersebut berupa : kursi roda, tongkat dan alat bantu dengar.				
				- Pemberian Layanan Rujukan	Yakni memberikan layanan rujukan kepada PPKS yang memerlukan rujukan terhadap tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi baik individu, keluarganya maupun lingkungan sekitarnya. Layanan rujukan ini ditujukan kepada UPT-UPT baik	Dana tersedia sebesar Rp.11.622.500,- terealisasi Rp. 11.622.500,- serapan dana 100 %. Keberhasilan kegiatan 100 %. Kegiatan ini berupa pemberian layanan rujukan kepada PPKS yang memerlukan rujukan terhadap tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi baik individu, keluarganya maupun lingkungan sekitarnya.	a) Keterbatasan dana hanya bisa memberikan layanan rujukan kepada PPKS yang benar-benar memerlukan. b) Perlunya shelter/rumah aman yang memadai untuk membina, membimbing PPKS sebelum dirujuk.	a) Meminta kepada Baznas untuk memfasilitasi PPKS yang perlu dirujuk dan bantuan transport maupun perbekalannya. b) Sebagian dana fasilitasi rujukan ke UPT Kemensos RI dibiayai oleh pusat.	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Pemmasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					dibawah jajaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat maupun Kemensos RI. Tujuan pemberian layanan rujukan ini adalah memberikan bimbingan mental, fisik, spiritual dan sosial kepada yang bersangkutan dan bimbingan pelatihan keterampilan untuk melatih kemandiriannya.				
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Yang dimaksud reunifikasi keluarga adalah mengembalikan	Dana tersedia sebesar Rp.5.000.000,- terealisasi Rp.	a) Karena keterbatasan dana kita hanya memfasilitasi orang	a) Meminta bantuan fasilitasi reunifikasi keluarga kepada	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					PPKS/yang bersangkutan kembali kepada keluarga dan bisa menikmati kehidupan sebagaimana mestinya baik yang berasal dari dalam maupun luar Kabupaten Dharmasraya yakni dengan menunjukkan surat pengantar terlantar/meneruskan perjalanan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota lain, surat keterangan dari kepolisian dan identitas kependudukan.	5.000.000,- serapan dana 100 %. Keberhasilan kegiatan 100 %. Kegiatan ini fasilitasi pemulangan PPKS seperti lansia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan orang terlantar termasuk Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ) sebanyak 19 (sembilan belas) orang : 2 (dua) orang lansia eterlantar, 2 (dua) orang tuna sosial (ODGJ) dan 15 (lima belas) orang terlantar melalui estafet antar Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Provinsi di seluruh Indonesia. Biaya yang diberikan berupa uang transport dan makan selama di	terlantar yang terdekat. b) Masih belum adanya sebagian penduduk Indonesia yang belum mempunyai identitas kependudukan Jadi masih kesulitan untuk melakukan pemulangan kepada keluarganya.	Baznas. b) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota lain maupun kepada keluarganya untuk proses reunifikasi keluarga.	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial kepada Keluarga, Masyarakat, Shelter dan Pusat Kesejahteraan Sosial	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada keluarga, masyarakat, shelter dan pusat kesejahteraan bersama merupakan usaha untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku, pola pikir, mindset, paradigma sehingga diharapkan akan memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang	perjalanan. Dana tersedia sebesar Rp.20.599.000,- terealisasi Rp. 20.473.200,- serapan dana 99,39 %. Keberhasilan kegiatan 300 % : target bimbingan 200 orang capaian 600 org. Kegiatan ini berupa edukasi, sosialisasi ke keluarga, masyarakat, shelter dan ke pusat-pusat kesejahteraan sosial. Lokus bimbingan ini menitikberatkan pada program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial (terkait kasus-kasus anak yang ditangani sakti peksos) dan perlindungan jaminan sosial. Tim Bimbingan melibatkan stake	a) Karena keterbatasan dana banyak nagari/daerah yang belum terjangkau dengan bimbingan dimaksud. b) Masih adanya mindset dan paradigma sebagian masyarakat yang susah untuk dirubah.	a) Tanpa anggarapun sebagian daerah yang terdekat dengan ibukota tetap kita fasilitasi untuk melakukan bimbingan. b) Perubahan mindset dan paradigma dilakukan dengan pendekatan face to face dan keluarga.	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					terpunji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, di shelter dan di pusat-pusat kesejahteraan sosial.	holder terkait seperti (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kumperdag, Dinas Pendidikan, Kemenag, Camat, Nagari dan pihak-pihak lainnya).			
				IV	Program Penanganan Bencana		c)	c)	
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Bencana yang terjadi selama tahun 2021 adalah bencana alam/sosial yaitu pandemi covid 19, kebakaran, puting beliung, tanah longsor dan banjir.	Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 540.967.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 540.680.550,- (99,95%)	a. Keterbatasan dana dan sarana prasarana (perahu karet dan kendaraan untuk kegiatan evakuasi) untuk penanggulangan bencana belum tersedia. b. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap	a. Memperbanyak armada / Unit pemadam kebakaran; b. Membentuk lembaga yang menangani bencana, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Taruna Siaga Bencana	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							<p>kesepakatan pembiayaan sarana dan prasarana untuk biaya service, penyediaan suku cadang dan pembayaran pajak kendaraan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pusat tidak memadai.</p> <p>c. Kerjasama lintas sektoral saat terjadinya bencana;</p> <p>d. Menyediakan bahan makanan untuk antisipasi terjadinya bencana serta menyediakan peralatan penanggulangan bencana, tenda, alat masak untuk dapur umum;</p> <p>e. Melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas dalam penanggulangan bencana;</p> <p>f. Potensi bencana</p>	<p>(TAGANA) dan Tim Search And Reschue (SAR) serta Tim Pemadam Kebakaran;</p>	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								yang diperkirakan terjadi	

### II. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Peerindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		1 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					
				1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan	Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 48.172.000,- dengan realisasi sebesar Rp.46.805.400, (97,16%).	a. Focal point masing-masing OPD belum maksimal mempromosikan PUG pada unit kerja. b. Proses Perencanaan dan	a. Peningkatan pemahaman PUG melalui sosialisasi dan pelatihan pada Tim Focal Point OPD sehingga strategi PUG benar-benar	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan		<p>Penganggaran pada masing-masing OPD secara umum belum menggunakan GAP dan GBS</p> <p>c. Anggaran yang masih terbatas dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang responsif gender.</p>	<p>dapat diterapkan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.</p> <p>b. Dalam proses perencanaan dan penganggaran OPD menggunakan analisa GAB dan GBS.</p>	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					<p>pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung pembangunan di berbagai bidang, dan dalam rangka mendukung implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik pusat maupun daerah untuk mengintegrasik</p>				

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					<p>an aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.</p> <p>Salah satu upaya percepatan pengarusutamaan gender di daerah adalah melalui kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender tahun 2021 meliputi pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan</p>				

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					<p>an Gender di Kabupaten Dharmasraya melalui SK Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/94/KPT S-BUP/2021, pembentukan Focal Point PUG di seluruh OPD dan Instansi vertical se-Kabupaten Dharmasraya melalui SK Bupati Nomor: 188.45/92/KPT S-BUP/2021, menyelenggarakan pelatihan PPRG dan penyusunan GAP dan GBS bagi anggota focal point seluruh</p>				

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					<p>Organisasi Perangkat Daerah, tersusunnya buku Profil Gender dan Anak, terlaksananya promosi dan advokasi PUG pada TAPD dan jejaring (DPRD, Instansi vertical dan Ormas). Sasaran dari kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender adalah meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan</p>				

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					serta evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Dharmasraya dan menghasilkan anggaran responsif gender dimana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodir kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kelompok sasaran dalam kegiatan ini adalah Pokja PUG dan Focal Point PUG yang				

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					<p>terdiri dari sekretaris dan kasubag perencanaan semua OPD.</p> <p>Sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya atas komitmen dan peran pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam strategi Pengarusutamaan Gender melalui 7 (tujuh) prasyarat dan pelaksanaan Perencanaan</p>				

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					dan Penganggaran yang Responsif Gender, pada tahun 2021 Kabupaten Dharmasraya diberikan penghargaan <b>Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Pratama</b> oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.					
				2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2018 tentang	Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 660.043.200,- dengan realisasi keuangan Rp. 641.306.021,- (97,16 %).	Belum optimalnya peran Organisasi Perempuan sebagai mitra Pemerintah dalam mengatasi permasalahan perempuan dan anak di Kabupaten	Membuat kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi perempuan sehingga bisa lebih berperan dalam	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Kab/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan Pemerintah Daerah bertanggungjawab ab menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas lembaga penyedia		Dharmasraya.	pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Dharmasraya.	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					<p>layanan pemberdayaan perempuan. Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.</p> <p>Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan diantaranya, rapat pertemuan organisasi perempuan,</p>				

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					kegiatan konsultasi dan koordinasi ke Provinsi, kegiatan Study Komparatif dan Sharing Informasi, kegiatan sosialisasi dan seminar dan kegiatan Peringatan Hari Ibu.					
				II	<b>Program Perlindungan Perempuan</b>					
				I	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Upaya perlindungan perempuan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah kepada	Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 75.286.550,- dengan realisasi keuangan Rp. 74.736.400,- (99,27%).	a. Belum optimalnya kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. b. Masih rendahnya tingkat	a. Mengupayakan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara aktif terhadap pencegahan tindak kekerasan terhadap	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					<p>masyarakat bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan meliputi sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat, pembentukan jejaring perlindungan perempuan di tingkat</p>		<p>pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang upaya pencegahan serta penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan</p> <p>c. Masih lemahnya jejaring dalam upaya perlindungan perempuan baik di tingkat kecamatan dan nagari serta instansi terkait lainnya.</p> <p>d. Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam penanganan kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan</p>	<p>perempuan baik dalam bentuk sosialisasi, jejaring dalam pelaporan dan penjangkauan kasus serta upaya pendampingan dan rehabilitasi terhadap perempuan korban tindak kekerasan.</p> <p>b. Mengupayakan kegiatan untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga masyarakat serta instansi terkait dalam urusan perlindungan perempuan</p> <p>c. Mengupayakan</p>	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					kecamatan dan nagari, penjangkauan kasus-kasus kekerasan serta kegiatan pendampingan terhadap perempuan korban tindak kekerasan. Kegiatan-kegiatan ini dimaksudkan untuk meminimalkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan mengoptimalkan penanganan dan pendampingan terhadap kasus-kasus tindak kekerasan yang terjadi di			peningkatan sarana dan prasarana dalam kegiatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun kapasitas SDM yang ada.	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					Kabupaten Dharmasraya.					
				II	<b>Program Pemenuhan Hak Anak</b>					
				1	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota.	Kegiatan pengembangan KLA yang dilaksanakan tahun 2021 dalam rangka pemenuhan hak sipil dan kebebasan diantaranya melalui Pelatihan Musrenbang bagi Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Nagari. Pemenuhan hak anak atas kesehatan dasar dan	Alokasi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 67.072.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 66.274.450,- (98,81%).	a. Masih kurangnya pemahaman, koordinasi, kerjasama tentang kegiatan Kabupaten Layak Anak pada OPD terkait; b. Masih kurangnya peran Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam mendukung percepatan Kabupaten Layak Anak; c. Belum semua sekolah dan puskesmas menginisiasi menjadi sekolah dan puskesmas	a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait tentang kegiatan yang mendukung percepatan Kabupaten Layak Anak; b. Melakukan sosialisasi Kabupaten Layak Anak pada Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha; c. Mendorong semua sekolah dan puskesmas untuk menjadi sekolah dan	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					<p>kesejahteraan dengan kegiatan pembinaan pada 6 (enam) Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak antara lain Puskesmas Sungai Dareh, Puskesmas Sitiung I, Puskesmas Sungai Rumbai, Puskesmas Gunung Medan, Puskesmas Koto Baru dan Puskesmas Timpeh. Pemenuhan hak anak atas</p>		<p>ramah anak; d. Keterlibatan forum anak dalam perencanaan anggaran masih terbatas.</p>	<p>puskesmas ramah anak; d. Melakukan diseminasi informasi kepada pemerintah kecamatan dan nagari untuk melibatkan forum anak dalam musrenbang.</p>	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					<p>pendidikan dengan kegiatan pembinaan pada sekolah – sekolah yang telah diinisiasi menjadi sekolah rintisan pengembangan sekolah ramah anak.Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan pembinaan pada Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak dan Gugus Tugas Nagari layak anak. Berdasarkan hasil evaluasi Kabupaten Layak Anak tahun 2021,</p>				

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Kabupaten Dharmasraya mendapatkan penghargaan sebagai <b>Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya</b> dimana sebelumnya pada tahun 2019 mendapatkan penghargaan sebagai <b>Kabupaten Layak Anak Peringkat Pratama</b>				
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			1	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana</b>				
				1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan	Kegiatan ini merupakan kegiatan Biaya Operasional	Alokasi anggaran untuk kegiatan ini Rp. 2.476.047.000,- dengan realisasi	Tidak ada masalah yang berarti	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal (DAK Non Fisik)	Penyuluhan KB, Biaya Operasional Pengolahan Data, Biaya Operasional Pembinaan Kader, Biaya Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan, Biaya Dukungan Langgan Daya dan Jasa, Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Dari Gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota Ke Fasilitas Kesehatan/Klinik, Operasional Visitasi dan	anggaran sebesar Rp.2.450.280.900,- atau 98,96 % dan capaian kegiatan 99 %.			

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Registrasi Faskes, Operasional Penggerakan Pelayanan KB, Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB, Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan, Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (POKTAN), Biaya Operasional Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Oleh Kader di Wilayah Kerjanya,				

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					Dukungan Manajemen, Dukungan Pembuatan Media KIE					
				2	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan ini merupakan kegiatan Belanja Obat-Obatan, Pengadaan Sarana Prasarana Infrastruktur Sistem Informasi Keluarga di Balai Penyuluhan KB, Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB, Furniture dan Kelengkapan Balai Penyuluhan KB, Biaya	Alokasi anggaran untuk kegiatan ini Rp.1.155.942.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.140.927.700,00, - atau 98,70% dengan capaian fisik 100%.	Pendistribusian hasil pengadaan pada daerah-daerah tertentu	Menggunakan kendaraan khusus dan memilih waktu yang tepat.	

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penunjang				
				II	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				
				1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (APBD)	Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemilihan Duta GenRe tingkat Kabupaten Dharmasraya yang selanjutnya mewakili Dharmasraya untuk pemilihan Duta GenRe Tingkat Sumatera Barat yang di adakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang serta	Alokasi anggaran untuk kegiatan ini Rp.75.353.250,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 75.235.400,- dengan capaian fisik 100%.		

# LKPJ DINSOSP3APPKB 2021

## Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					melaksanakan pembinaan terhadap kader dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) di Kabupaten Dharmasraya.				

### B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

#### 1. Sosial

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Permasalahan yang diselesaikan
1	Terkait Data Penerima Dana Bantuan Sosial yang berasal dari Kementerian Sosial berdasarkan pantauan kami di lapangan saat ini data yang digunakan masih berpedoman pada data yang lama dan sudah tidak valid lagi karena sudah banyak penerima bantuan yang saat ini kondisi ekonominya sudah meningkat sehingga sampai saat ini masih menerima bantuan, untuk itu kami minta Dinas terkait untuk segera mengupdate data penerima bantuan berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh masing-masing Wali Nagari.	DINSOSP3APPKB sudah berkoordinasi dengan Dinas PMD melalui surat sekda agar Nagari meganggarkan verifikasi dan validasi data DTKS melalui dana desa sesuai Permendes PD TT NO 11 tahun 2019 untuk melakukan pemutakhiran data kemiskinan.	Penyelesaian perbaikan data dan pengajuan usulan data penerima bantuan sosial harus padan dengan data Disdukcapil sesuai dengan surat Kementerian Sosial RI perihal percepatan perbaikan data dan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial yang dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG.

### BAB III

#### PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Dharmasraya Kepada Bupati Dharmasraya adalah Laporan berupa informasi penyelenggaraan program dan kegiatan d Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya selama satu tahun anggaran. Laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) tahun 2020 ini merupakan laporan mengenai perkembangan dan fungsi sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Daerah, sehingga penyelenggaraan organisasi di daerah dapat dikonstruksikan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan, tujuan dari laporan ini juga sebagai upaya melihat perkembangan, kemajuan dan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan serta bahan evaluasi dalam penyelenggaraan organisasi.

Kegiatan penyelenggaraan organisasi perangkat daerah yang telah diuraikan, disadari masih banyak terdapat kekurangan dan perlu penyempurnaan kedepannya. Untuk itu masukan yang positif dan membangun sangat dibutuhkan demi penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih baik.

Demikian laporan keterangan pertanggung jawaban Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ini dibuat, untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja dan pencapaian visi dan misi Bupati Dharmasraya yang telah ditetapkan bersama dalam upaya mewujudkan pembangunan Kabupaten Dharmasraya Maju yang Mandiri dan Berbudaya.